

**INDONESIA TANPA KORUPSI:  
APBN CUKUP UNTUK KESEJAHTERAAN**

**Shafa Tsuraya Gayatri**  
[dizsyank@gmail.com](mailto:dizsyank@gmail.com)  
**PoltekkesKemenkesRiau**

## **1. PENDAHULUAN**

Korupsi telah lama menjadi salah satu tantangan utama pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Meskipun anggaran negara terus meningkat, banyak indikator kesejahteraan rakyat masih tersendat karena sebagian besar dana APBN mengalir keluar dari jalur yang seharusnya. Praktik korupsi tidak hanya mengurangi efektivitas belanja masyarakat, namun juga memperlebar jurang ketimpangan dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ilmu pendidikan budaya, korupsi menjadi topik sentral karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Indonesia yang masih berupaya keluar dari status negara dengan pandangan budaya dan ekonomi tidak bisa lagi mengabaikan dampak korupsi yang merusak integritas budaya, kejujuran, dan rasa keadilan. Oleh karena itu, membahas bagaimana korupsi Indonesia tanpa dapat mengubah wajah APBN menjadi instrumen nyata untuk kesejahteraan rakyat melalui pendidikan anti-korupsi dan pembiasaan budaya jujur menjadi hal yang sangat penting dan relevan.

## **2. PERNYATAAN OPINI / TESIS**

APBN Indonesia yang besar akan cukup untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat jika Indonesia benar-benar bebas dari korupsi, karena seluruh dana akan tersalur secara efisien dan tepat sasaran ke sektor-sektor kunci seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Opini ini didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan korupsi mengurangi efektivitas belanja negara dan memperlebar ketimpangan, sehingga pemberantasan korupsi bukan hanya ranah hukum, tetapi juga ranah kebijakan publik yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

## **3. ARGUMEN ILMIAH**

### **3.1. Argumen Pertama**

**Korupsi mengurangi efektivitas belanja APBN dan meningkatkan kinerja sektor publik.**

Banyak penelitian menunjukkan bahwa korupsi mengurangi efisiensi belanja masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan tidak menghasilkan manfaat yang proporsional bagi masyarakat (Transparency International, 2024; Rian & Campbell, 2018). Dalam studi ekonomi pembangunan, indeks persepsi korupsi (misalnya dari Corruption Perceptions *Index* Transparency International) sering dikorelasikan dengan indikator kesejahteraan seperti angka kemiskinan, akses layanan kesehatan, dan mutu pendidikan

(Transparency International, 2024; Ali & Ardi, 2024). Di Indonesia, hilangnya triliunan rupiah akibat korupsi berarti berkurangnya ruang fiskal untuk menuntaskan masalah kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan, sebagaimana dijelaskan dalam kajian dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Transparency International, 2024; Jurnal Pemerintahan dan Politik, 2024). Tanpa korupsi, setiap program bantuan sosial, program gizi, dan layanan kesehatan primer dapat berjalan maksimal karena anggaran yang ada benar-benar mencapai target, sebagaimana didukung oleh penelitian yang menunjukkan korelasi positif antara penurunan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik (Transparency International, 2024; Yasya et al., 2021).

### **3.2. Argumen Kedua**

#### **APBN Indonesia yang besar memiliki potensi membiayai kesejahteraan rakyat jika dikelola secara transparan dan bebas korupsi.**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa APBN Indonesia mencapai ribuan triliun rupiah per tahun, yang jauh lebih besar dari kebutuhan minimal untuk menjamin akses dasar kesehatan, pendidikan, dan pangan yang layak bagi seluruh penduduk. Namun karena adanya mark-up, penyuapan, dan penyimpangan proyek, sebagian besar dana “hilang” di tengah jalan, sehingga efektivitas belanja publik untuk kesejahteraan rakyat menurun secara signifikan (Transparency International, 2024; Ali & Ardi, 2024). Dalam literatur administrasi publik dan kebijakan fiskal, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar anggaran negara dapat berfungsi sebagai alat redistribusi dan pemerataan, karena sistem yang transparan membantu mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan anggaran (DJPB Kementerian Keuangan, 2024; Yasya et al., 2021). Jika Indonesia mampu mewujudkan transparansi pengelolaan APBN dan mengurangi korupsi, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa APBN yang ada sudah cukup untuk mewujudkan kesejahteraan dasar bagi seluruh rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam kajian-kajian tentang transparansi APBN dan kesejahteraan sosial (Qisth, 2021; Transformasi Keuangan Negara, 2024).

### **3.3. Argumen Ketiga**

#### **Indonesia tanpa korupsi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saing ekonomi, sehingga mendorong investasi dan pembangunan berkelanjutan.**

Dalam teori kebijakan publik, kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Transparency International, 2024; Rian & Campbell, 2018). Korupsi mengikis kepercayaan rakyat, sehingga banyak program pembangunan mengalami resistensi, manipulasi, atau kegagalan tercapai, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian tentang pengaruh korupsi terhadap kebijakan publik dan stabilitas pemerintahan (Ali & Ardi, 2024). Di sisi lain, negara-negara dengan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan rendah korupsi cenderung memiliki daya tarik investasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, karena transparansi kebijakan fiskal mampu mengurangi perekonomian dan membangun kepercayaan pelaku usaha (DJPB Kemenkeu, 2024; Transformasi Keuangan Negara, 2024). Jika Indonesia benar-benar bebas

korupsi, APBN akan dipersepsi sebagai alat pemerataan yang adil, bukan sebagai sumber keuntungan segelintir oknum, sebagaimana dijelaskan dalam ulasan tentang transparansi dan akuntabilitas APBN yang meningkatkan kepercayaan masyarakat (Qisth, 2021). Hal ini mendorong partisipasi masyarakat, partisipasi swasta, dan kolaborasi global yang lebih kuat dalam pembangunan kesejahteraan rakyat.

#### 4. DISKUSI / IMPLIKASI

Tesis bahwa Indonesia tanpa korupsi akan membuat APBN cukup untuk kesejahteraan memiliki makna penting bagi kebijakan publik, pendidikan, dan budaya organisasi. Di bidang kebijakan, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas APBN, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan pemantauan anggaran. Di bidang pendidikan, materi integritas dan anti-korupsi perlu menjadi bagian kurikulum formal maupun non-formal, sehingga generasi muda memahami bahwa korupsi bukan hanya “dosa moral”, tetapi juga kontra-produktif bagi pembangunan.

Dalam praktik lapangan, opini ini mengajak semua pihak baik itu pemerintah, lembaga pengawas, dunia usaha, dan masyarakat untuk membangun ekosistem yang menolak korupsi. Jika setiap rupiah APBN dapat dipertanggungjawabkan, target kesejahteraan, seperti pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan akses pendidikan berkualitas, bukan lagi mimpi, tetapi hasil logistik dari pengelolaan fiskal yang bersih dan bertanggung jawab.

#### 5. PENUTUP

Indonesia tanpa korupsi bukan hanya cita-cita moral, tetapi kebutuhan nyata jika APBN ingin benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat. Dengan ditiadakannya korupsi, anggaran yang tersedia akan lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu menjangkau sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan sosial. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan pendidikan, budaya, dan tata kelola negara, bukan sekedar urusan hukum atau penegakan hukum saja.

Beberapa rekomendasi yang dapat diambil antara lain:

- a. Memperkuat pendidikan anti-korupsi di sekolah dan perguruan tinggi, mulai dari kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pembiasaan budaya jujur di lingkungan pendidikan.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBN melalui sistem pelaporan digital, partisipasi publik, dan pengawasan yang melibatkan lembaga masyarakat independen.
- c. Membangun budaya anti-korupsi dalam masyarakat melalui kampanye berkelanjutan, contoh teladan dari pemimpin masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Dengan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, Indonesia tanpa korupsi bukan impian belaka, tetapi langkah nyata menuju negara yang lebih adil, sejahtera, dan terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Ardi, H. (2024). Pengaruh korupsi terhadap kebijakan publik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2), 45–62.  
<http://jurnal.pemerintahan.uma.ac.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan APBN Indonesia 2025.  
<https://www.kemenkeu.go.id/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan tahunan KPK 2024. KPK.  
<https://www.kpk.go.id/>
- Transformasi Keuangan Negara. (2024). Transformasi keuangan negara: Langkah nyata menuju Indonesia inklusif. DJPb Kementerian Keuangan.
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024.  
<https://www.transparency.org/en/cpi>
- Yasya, R., dkk. (2021). *Analisis transparansi dan akuntabilitas APBN dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan*. Jurnal Qisth.